



BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1. SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Untuk mencapai visi RPJP Kota Balikpapan 2005-2025 ditetapkan 5 (lima) misi, yang selanjutnya dijabarkan dalam berbagai strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

5.1.1. MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING

1. Sasaran Pokok 1 : Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Arah Kebijakan :

- a. Mengembangkan kegiatan keagamaan masyarakat.dengan mendorong dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.
- b. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan pemuka agama/alim ulama dalam memberikan pembinaan kehidupan beragama kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana kehidupan beragama.
- d. Mengembangkan suasana kota yang religius dan berbudaya melalui peningkatan pemahaman warga kota terhadap nilai pluralisme serta

menghindarkan terjadinya konflik masyarakat yang disebabkan isu SARA.

2. Sasaran Pokok 2 : Meningkatnya Derajat dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dan mewujudkan kota yang sehat bagi masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, penyediaan pembiayaan kesehatan yang memadai dengan tetap memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan.
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara berkeadilan dengan mengutamakan kualitas dan keterjangkauan, agar "Health for All" atau Kesehatan untuk semua dapat tercapai.
- d. Menyediakan Sarana Prasarana Kesehatan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

3. Sasaran Pokok 3 : Meningkatnya cakupan masyarakat dalam mengikuti pendidikan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Arah Kebijakan :

- a. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang yang disediakan secara bermutu (berkualitas)

- dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- b. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Daerah dimasa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguasaan ilmu dan teknologi serta berdaya saing global.
 - c. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat (long life education) sesuai dengan kebutuhan Daerah dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vokasional) dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk.
 - d. Menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
4. Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya pembinaan terhadap keanekaragaman budaya secara partisipatif
- Arah Kebijakan :
- a. Membina kesatuan dan persatuan masyarakat.
 - b. Menyediakan Sarana Prasarana yang mendukung pembinaan keanekaragaman seni dan budaya.
 - c. Melestarikan adat istiadat dan budaya yang heterogen dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.
5. Sasaran Pokok 5 : Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk
- Arah Kebijakan :
- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana (KB).

- b. Menata perkembangan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota.
 - c. Memantapkan dan menyempurnakan pelaksanaan administrasi kependudukan yang didukung teknologi informasi
 - d. Meningkatkan perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak penduduk.
6. Sasaran Pokok 6 : Meningkatnya peranan pemuda dan prestasi olahraga
- Arah Kebijakan :
- a. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda diberbagai bidang pembangunan.
 - b. Mendorong terciptanya budaya olahraga dan prestasi olahraga dikalangan masyarakat.
 - c. Menyediakan berbagai prasarana dan sarana kegiatan pemuda dan olahraga.
7. Sasaran Pokok 7 : Meningkatnya peranan perempuan dan perlindungan anak
- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta penghapusan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
 - c. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.

8. Sasaran Pokok 8 : Menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya

Arah Kebijakan :

- a. Menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal;
- b. Menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja, serta kesehatan dan keselamatan kerja;
- c. Meningkatkan kualitas dan ketrampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- d. Menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelatihan kerja baik formal maupun nonformal;
- e. Meningkatkan kualitas sistim informasi tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan dunia usaha dan para pekerja.

9. Sasaran Pokok 9 : Menurunnya angka penduduk miskin

Arah Kebijakan :

- a. Melaksanakan penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan yang diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Meningkatkan rasa percaya diri penduduk miskin agar dapat mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial dan ekonominya.

10. Sasaran Pokok 10 : Meningkatnya Derajat kesejahteraan sosial masyarakat

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan yang tepat guna bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan penyediaan pelayanan sosial yang memadai.

5.1.2. MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG MEMADAI

1. Sasaran Pokok 1: Meningkatnya jaringan perhubungan darat, laut dan udara yang terintegrasi baik di lingkungan internal Kota Balikpapan maupun yang menghubungkan Kota Balikpapan dan sekitarnya.

Arah Kebijakan :

- a. Mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi antar wilayah mainland dan hinterland.
 - b. Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta prasarana transportasi darat, laut dan udara yang handal.
 - c. Mengembangkan moda transportasi darat, laut dan udara yang efisien.
2. Sasaran Pokok 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan sistem jaringan drainase.
 - b. Meningkatkan penyediaan prasarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat.
 - c. Meningkatkan penyediaan lahan dan perumahan melalui hunian vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan relokasi permukiman di wilayah rawan bencana.
3. Sasaran Pokok 3 : Meningkatnya kualitas, kuantitas dan distribusi penyediaan air bersih.

Arah Kebijakan :

- a. Mengembangkan sumber air baku yang memenuhi kebutuhan jangka panjang.
 - b. Meningkatkan pelayanan air bersih hingga layak minum (drinkable water) yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
4. Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya Sumberdaya Energi yang ramah lingkungan

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya energi secara efektif dan efisien.
 - b. Mengembangkan sumber daya energi terbarukan (renewable) yang ramah lingkungan.
5. Sasaran Pokok 5 : Meningkatnya penataan ruang yang aman, nyaman, produktif

Arah Kebijakan :

- a. Melaksanakan penataan ruang kota sesuai rencana umum dan rencana rinci yang telah ditetapkan.
6. Sasaran Pokok 6 : Meningkatnya Sanitasi Sehat

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi baik pengolahan air limbah maupun persampahan.
- b. Mengembangkan manajemen sanitasi sehat (sampah, drainase dan air limbah).
- c. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

5.1.3. MEWUJUDKAN KOTA LAYAK HUNI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

1. Sasaran Pokok 1 : Mempertahankan pola ruang 52% Hijau dan 48% Budidaya

Arah Kebijakan:

a. Meningkatkan peran BKPRD Kota Balikpapan

2. Sasaran Pokok 2 : Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan pengelolaan perparkiran, trotoar, median dan ruang terbuka hijau.

b. Meningkatkan kegiatan 3R (Reduce, Reuse and Recycle) untuk mengurangi timbulan sampah Kota Balikpapan.

3. Sasaran Pokok 3 : Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup

Arah Kebijakan :

a. Mempertahankan pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya.

b. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

c. Mengembangkan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.

4. Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban kota

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban kota

5.1.4. MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG KREATIF

1. Sasaran Pokok 1 : Meningkatnya potensi ekonomi yang berbasis masyarakat

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan pertanian tanaman pangan.
 - b. Perluasan areal tanaman perkebunan pada areal non produktif.
 - c. Pengembangan peternakan diarahkan untuk memenuhi kecukupan kebutuhan akan konsumsi daging ternak yang sehat dan berkualitas.
 - d. Pengembangan perikanan dan kelautan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan untuk masyarakat dan keperluan export.
 - e. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing.
 - f. Pengembangan UMKMK diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat,
2. Sasaran Pokok 2 : Berkembangnya ekonomi riil masyarakat yang inovatif dan kreatif

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan Industri diarahkan dalam rangka pengembangan industri manufaktur dalam rangka memperkuat basis ekonomi.
- b. Pengembangan Perdagangan diarahkan dalam rangka memperkuat Kota Balikpapan sebagai kota kolektor dan distributor bagi daerah sekitarnya.

3. Sasaran Pokok 3 : Meningkatnya Iklim Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas.
 - b. Pengembangan investasi lainnya juga diarahkan terhadap sektor pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kota khususnya untuk pembangunan infrastruktur dasar baik dibidang ekonomi maupun sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan Kota.
4. Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya Kapasitas Ekonomi Daerah dan terpenuhinya kebutuhan teknologi aplikatif

5.1.5. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Sasaran Pokok 1 : Menata kelembagaan pemerintahan daerah

Arah Kebijakan :

- a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat maupun kebutuhan kota dalam rangka memberikan pelayanan prima.
2. Sasaran Pokok 2 : Meningkatnya sistem informasi manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan sistim informasi manajemen dalam pengelolaan kota agar masyarakat dapat memperoleh akses yang seluas-luasnya terhadap berbagai informasi penyelenggaran pemerintahan, pembangunan Kota dan pelayanan publik.
 - b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi didalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota, dengan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
3. Sasaran Pokok 3 : Meningkatnya kualitas kemitraan antar daerah, lembaga dan kerja sama luar negeri

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan kemitraan antar daerah melalui organisasi Pemerintahan atau melalui sistem jejaring (networking) antardaerah yang bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman, saling berbagi keuntungan, maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional.
 - b. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga baik lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan lembaga masyarakat lainnya dengan memanfaatkan potensi, keunggulan dan pengalaman lembaga yang bersangkutan.
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan luar yang bermanfaat bagi Kota.
4. Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya Kapasitas Manajemen Pemerintah Kota

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan kapasitas pemerintah Kota meliputi kapasitas manajerial dan teknis fungsional.

- b. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah Kota.
- d. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah Kota dan upaya meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.

5. Sasaran Pokok 5 : Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan pengelolaan keuangan Daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektifitas pemanfaatan.
- b. Meningkatkan kemandirian Daerah dalam upaya untuk menggali sumber penerimaan Daerah yang berasal dari Daerah sendiri.
- c. Meningkatkan pelayanan publik dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik .

6. Sasaran Pokok 6 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan dengan melibatkan dalam proses perumusan kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan Daerah.

7. Sasaran Pokok 7 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan Daerah terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik

Meningkatkan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur Pemerintah Kota melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

5.2. TAHAPAN DAN PRIORITAS

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan pentahapan dan skala prioritas. Tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan dibagi dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :

5.2.1 RPJMD Tahap I (2005-2009)

Pada kurun waktu 2005 - 2009 RPJMD tahap I, pembangunan diarahkan pada Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur berbasis IMTAQ dan IPTEK, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana, manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi daerah yang berorientasi pasar, serta peningkatan dan pengembangan infrastruktur daerah.

Tahapan dan prioritas pembangunan pada Periode Pertama ini adalah sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing;

Sasaran misi kesatu pada RPJMD Ke-1 ini adalah mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai budaya dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang maju dan sejahtera

Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan strategi dan kebijakan RPJMD Ke-1 ini adalah sebagai berikut:

1. Meletakkan dasar sistem pelayanan pendidikan formal dan non formal, serta pemerataan pendidikan, melalui peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis moral dan budi pekerti serta berorientasi pada jiwa kepemimpinan dan profesional guna mewujudkan kualitas lulusan yang didukung dengan upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran.
3. Mendorong terwujudnya generasi muda yang profesional dan berprestasi sejalan dengan pembangunan parasarna dan sarana olah raga yang selektif disertai dengan pembekalan infrastruktur olah raga yang memadai.
4. Mendorong tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama memenuhi kebutuhan warga miskin dan kurang mampu melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pengembangan puskesmas, tenaga medis dan peralatan medis.
5. Pembinaan pemahaman dan pengamalan kehidupan umat beragama, peningkatan toleransi inter dan antar umat beragama serta

pengembangan kebudayaan daerah yang berbasis pada nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

Misi II : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai;

Sasaran misi Kedua pada RPJMD Ke-1 ini adalah mewujudkan kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Balikpapan dengan aman dan nyaman serta berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan strategi dan kebijakan RPJMD Ke-1 ini adalah sebagai berikut:

1. Integrasi sarana dan prasarana antara Kota Balikpapan dengan wilayah sekitarnya sehingga peningkatan perekonomian dan pemenuhan komoditas di Kota Balikpapan dan sekitarnya dapat tercipta dengan sinergis.
2. Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta prasarana transportasi darat, laut dan udara yang handal serta berkelanjutan.
3. Pengembangan moda transportasi yang berorientasi pada *mass trasport* (sarana transportasi massal) yang lebih modern dan ramah lingkungan seperti trem, monorel, *mass rapid trasport* (jaringan kereta bawah tanah).
4. Antisipasi kebutuhan lahan parkir yang terus meningkat dengan implementasi kantong-kantong parkir yang terintegrasi dengan moda pendukungnya yang tersebar di seluruh kawasan strategis di Kota Balikpapan, untuk menghindarkan *parking on the street*.
5. Peningkatan sistim sarana prasarana drainase yang handal dalam rangka mengurangi titik-titik genangan maupun banjir yang terjadi di

- seluruh wilayah Kota Balikpapan, dengan intergrasi dan manajemen banjir melalui pengelolaan jaringan Bendali dalam masterplan drainsae dengan jaringan pendukungnya secara komprehensif.
6. Peningkatan Prasarana dasar di Kawasan RSS yang meliputi sistem jaringan drainase, sanitasi sehat, dan jaringan jalan yang handal dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat menciptakan rasa nyaman dan berorientasi pada lingkungan.
 7. Penyediaan hunian yang berbasis hunian vertikal untuk pemenuhan kebutuhan perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) untuk menghindarkan permukiman liar di daerah-daerah rawan bencana di Kota Balikpapan melalui Program-program rusunawa dan rusunami yang ramah lingkungan dengan aplikasi *green buliding* yang dilaksanakan pemerintah Kota Balikpapan secara berkelanjutan.
 8. Pemenuhan standar mutu air baku yang diharapkan terus meningkat dan tercapai pada akhir masa RPJP dan pengembangan sumber air baku dengan pemantauan dan identifikasi penggunaan sumber air bawah tanah oleh masyarakat sehingga kehandalan sumber air bawah tanah sebagai sumber air baku pendukung selain air permukaan (waduk dan Bendali) tetap terjaga.
 9. Perluasan dan peningkatan pengembangan wilayah cakupan distribusi air minum hingga ke seluruh wilayah Kota Balikpapan serta implemantasi teknologi pengolahan air yang terdistribusi menjadi air bersih layak minum pada akhir periode RPJP.
 10. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya energi secara efektif dan efisien melalui pengasaan dan penindakan

terkait penambangan galian c secara liar.

11. Pemanfaatan dan implementasi sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan melalui diversifikasi energi listrik dari motor bakar menjadi energi listrik yang bersumber pada tenaga surya, tenaga angin dan sumber lain yang terbarukan dan ramah lingkungan pada instansi pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi lain di Kota Balikpapan.
12. Pada sektor penataan ruang diharapkan terciptanya kesadaran terhadap penataan ruang dan rencana penataan rinci yang telah ditetapkan dengan indikator menurunnya pelanggaran pemanfaatan ruang oleh stake holder.

Misi III : Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan;

Sasaran misi ketiga pada RPJMD Ke-1 ini adalah menetapkan tata kelola untuk mewujudkan Balikpapan menjadi Kota layak Huni yang berwawasan lingkungan melalui sasaran pokok yang telah ditetapkan yang berorientasi pada lingkungan dan implementasi kebijakan yang pro lingkungan agar tercipta kenyamanan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Mengembangkan sanitasi sehat adalah bagian dari sasaran pokok yang dituangkan melalui strategi menurunkan jumlah sampah yang terbuang ke TPA, yang mencerminkan kesadaran masyarakat dalam program 3R (reduce, reuse, recycling) yang telah dicanangkan pemerintah Kota

Balikpapan dan menjadi isu *global warming*, menurunnya titik genangan yang tersebar di kawasan Kota Balikpapan merupakan bagian dari pengembangan sanitasi sehat, dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas IPAL dan sebaran IPAL di Kota Balikpapan sebagai bentuk sanitasi sehat pada sektor air limbah.

2. Mempertahankan pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya merupakan sasaran pokok yang implementasinya adalah manajemen kontrol kawasan berjalan efektif dengan kontrol dari pemerintah Kota agar dapat mempertahankan Pola ruang pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya sampai pada masa RPJP berakhir.
3. Mengembangkan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim salah satu sasaran pokok yang wujud implementasinya adalah monitoring degradasi dan perubahan pemanfaatan lahan non budidaya menjadi kawasan budidaya yang sedikit banyak akan mempengaruhi proporsi pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya, bentuk lainnya adalah untuk monitoring perubahan pemanfaatan lahan kritis untuk kawasan budidaya yang diharapkan dapat menurun dan sampai pada akhir masa RPJP ini dapat diminimalkan.
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban kota salah satunya adalah perluasan dan peningkatan kapasitas sistem ATCS dan ITC yang telah diimplementasikan untuk jaminan kemandirian dan ketertiban dalam berlalulintas oleh masyarakat Kota Balikpapan.

Misi IV : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Sasaran misi keempat pada RPJMD Ke-1 adalah mewujudkan perekonomian

daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah yang berfokus pada perdagangan dan jasa, agribisnis, agroindustri, pariwisata, dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan pada perbaikan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah peningkatan peranan strategis sektor basis daerah dan pelaku ekonomi kerakyatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
2. Meningkatkan akses permodalan, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi, pembinaan dan peningkatan jaringan pemasaran bagi Koperasi, UMKM dan BUMD.
3. Meningkatkan kemampuan dan produktivitas usaha melalui optimalisasi sumberdaya pertanian, peternakan, perikanan yang berbasis agribisnis.
4. Meningkatkan peluang dan kemitraan usaha secara sinergis antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha disertai pengembangan pelatihan tenaga kerja guna menumbuhkembangkan hubungan dan kesesuaian antara kualifikasi keahlian dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan guna mendorong daya tarik objek wisata serta pelayanan jasa pariwisata yang handal.

6. Meningkatkan pelestarian, reboisasi dan rehabilitasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Misi V : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik;

Sasaran misi kelima pada RPJMD Ke-1 ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di seluruh tingkatan yang transparan dan akuntabel melalui penataan kelembagaan, manajemen publik serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur berbasis pengembangan dan pemanfaatan lptek.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi yang dinamis, beretika serta berorientasi pada upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Memantapkan kemampuan keuangan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah disertai dengan pengawasan yang baik.

4. Penataan kelembagaan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan.

5.2.2 RPJMD Tahap II (2010-2014)

Tahap Kedua atau RPJMD Ke-2 dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perwujudan pelaksanaan pembangunan yang diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, pendidikan berkualitas yang berbasis IMTAQ dan IPTEK, kesejahteraan masyarakat yang berbasis ekonomi kerakyatan, pelayanan kesehatan, kualitas kehidupan yang agamis, berakhlak mulia dan berbudaya, pengelolaan potensi daerah, pembangunan infrastruktur, pemerataan sarana dan prasarana daerah, penataan ruang dan lingkungan hidup serta upaya mitigasi bencana. Tahapan dan prioritas pembangunan pada Periode Kedua ini adalah sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing ;

Sasaran misi kesatu pada RPJMD Ke-2 ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan agama yang merupakan tugas utama pemerintah. Kualitas hidup masyarakat, diukur dengan menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) yang terdiri dari indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks paritas daya beli. Untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat diperlukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi program dari seluruh satuan kerja yang ada.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi kedua pada Periode Kedua ini, ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada:

1. Membangun manajemen pendidikan yang demokratis dan semua stakeholder memberikan kontribusi di dalam memajukan dan menumbuhkembangkan suasana kondusif pada lembaga pendidikan.
2. Merancang sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya dalam berinovasi, berkreasi dan berkompetisi
3. Memfasilitasi penguatan dan pengembangan lembaga pendidikan perguruan tinggi.
4. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
5. Meningkatkan akses layanan, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan didukung dengan penyediaan, pemerataan dan kualitas sarana pendidikan serta tenaga pendidik yang memiliki kompetensi.
6. Membangun media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai proses pembelajaran yang efektif dan kreatif yang di dukung oleh tenaga pendidik yang professional.
7. Meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan dan masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
8. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan balita.
9. Peningkatan pelayanan terhadap penanganan penyakit menular.
10. Pengembangan jaminan kesehatan daerah.
11. Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin.

12. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis secara merata.
13. Peningkatan sosialisasi terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat pada masyarakat.
14. Peningkatan pengawasan obat dan makanan dan minuman.
15. Pendataan dan peningkatan status kesehatan siswa.
16. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan profesionalisme sumber daya kesehatan.
17. Pengembangan Rumah Sakit dan Puskesmas sesuai dengan standar kebutuhan.
18. Optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat.
19. Optimalisasi peran lembaga pendidikan dalam kehidupan yang agamis dan pembentukan karakter.
20. Mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan.
21. Optimalisasi peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan daerah.
22. Mengembang dan meningkatkan prestasi olahraga serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga.
23. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
24. Meningkatkan peran dan partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan lainnya dalam pembangunan.
25. Pembinaan dan peningkatan peran guru agama, ulama dan sekolah-sekolah keagamaan.
26. Menciptakan iklim yang kondusif, kreatif dan inovasi yang berbasiskan kebudayaan serta dan kerjasama sinergis antara paguyuban dengan

sektor-sektor lain, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi II: Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai;

Sasaran misi Kedua pada RPJMD Ke- 2 ini adalah mewujudkan kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Balikpapan dengan aman dan nyaman serta berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan strategi dan kebijakan RPJMD Ke-2 ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Integrasi sarana dan prasarana antara Kota Balikpapan dengan wilayah sekitarnya sehingga peningkatan perekonomian dan pemenuhan komoditas di Kota Balikpapan dan sekitarnya dapat tercipta dengan sinergis.
2. Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta prasarana transportasi darat, laut dan udara yang handal serta berkelanjutan.
3. Peningkatan dan perluasan jaringan *mass transport* (sarana transportasi massal) yang lebih modern dan ramah lingkungan seperti Saum, Trem, monorel, *mass rapid transport* (jaringan kereta bawah tanah).
4. Bertambahnya sarana lahan parkir yang terus meningkat dengan implementasi kantong-kantong parkir yang terintegrasi dengan moda pendukungnya yang tersebar di seluruh kawasan strategis di Kota Balikpapan, untuk menghindarkan *parking on the street*.
5. Berkurangnya titik genangan air melalui peningkatan sistim sarana prasarana drainase yang handal dalam rangka mengurangi titik-titik

genangan maupun banjir yang terjadi di seluruh wilayah Kota Balikpapan, dengan intergrasi dan manajemen banjir melalui pengelolaan jaringan Bendali dalam masterplan drainsae dengan jaringan pendukungnya secara komprehensif.

6. Peningkatan Prasarana dasar di Kawasan RSS yang meliputi sistem jaringan drainase, sanitasi sehat, dan jaringan jalan yang handal dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat menciptakan rasa nyaman dan berorientasi pada lingkungan.
7. Peningkatan penyediaan hunian yang berbasis hunian vertikal untuk pemenuhan kebutuhan perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) untuk menghindarkan permukiman liar di daerah-daerah rawan bencana di Kota Balikpapan melalui Program-program rusunawa dan rusunami yang ramah lingkungan dengan aplikasi *green buliding* yang dilaksanakan pemerintah Kota Balikpapan secara berkelanjutan.
8. Peningkatan standar mutu air baku dan pengembangan sumber air baku dengan pemantauan dan identifikasi penggunaan sumber air bawah tanah oleh masyarakat sehingga kehandalan sumber air bawah tanah sebagai sumber air baku pendukung selain air permukaan (waduk dan Bendali) tetap terjaga.
9. Perluasan dan peningkatan pengembangan wilayah cakupan distribusi air minum hingga ke seluruh wilayah Kota Balikpapan serta implemantasi teknologi pengolahan air yang terdistribusi menjadi air bersih layak minum pada akhir periode RPJP.
10. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya energi secara efektif dan efisien melalui pengasaan dan penindakan

terkait penambangan galian c secara liar.

11. Peningkatan pemanfaatan dan implementasi sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan melalui diversifikasi energi listrik dari motor bakar menjadi energi listrik yang bersumber pada tenaga surya, tenaga angin dan sumber lain yang yang terbarukan dan ramah lingkungan pada instansi pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi lain di Kota Balikpapan.
12. Menurunnya pelanggaran pemanfaatan ruang oleh stake holder.

Misi III : Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan;

Sasaran misi ketiga pada RPJMD Ke-1 ini adalah menetapkan tata kelola untuk mewujudkan Balikpapan menjadi Kota layak Huni yang berwawasan lingkungan melalui sasaran pokok yang telah ditetapkan yang berorientasi pada lingkungan dan implementasi kebijakan yang pro lingkungan agar tercipta kenyamanan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Sanitasi Sehat adalah bagian dari sasaran pokok yang dituangkan melalui strategi menurunkan jumlah sampah yang terbangun ke TPA, yang mencerminkan kesadaran masyarakat dalam program 3R (reduce, reuse, recycling) yang telah dicanangkan pemerintah Kota Balikpapan dan menjadi isu *global warming*, menurunnya titik genangan yang tersebar di kawasan Kota Balikpapan merupakan bagian dari pengembangan sanitasi sehat, dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas IPAL dan sebaran IPAL di Kota Balikpapan sebagai bentuk sanitasi sehat pada sektor air limbah.

2. Mempertahankan pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya merupakan sasaran pokok yang implematasinya adalah manajemen kontrol kawasan berjalan efektif dengan kontrol dari pemerintah Kota agar dapat mempertahankan Pola ruang pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya sampai pada masa RPJP berakhir.
3. Menurunkan degradasi dan perubahan pemanfaatan lahan non budidaya menjadi kawasan budidaya yang sedikit banyak akan mempengaruhi proporsi pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya,
4. perluasan dan peningkatan kapasitas sistem ATCS dan ITC yang telah diimplementasikan untuk jaminan keamanan dan dan ketertiban dalam berlalulintas oleh masyarakat Kota Balikpapan.

Misi IV : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Sasaran Misi keempat RPJMD ke-2 adalah meningkatnya perekonomian daerah yang akan mendorong stabilitas perekonomian daerah. Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Tantangan terbesar pemerintah daerah ke depan adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam mewujudkan kemandirian daerah, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat. Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu amanah dalam era otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Indikator keberhasilan meningkatnya daya saing daerah adalah peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN). Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Misi keempat pada Periode Kedua ini, maka ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada :

1. Mendorong pertumbuhan lapangan usaha perdagangan dan jasa yang berkualitas dan pro-rakyat miskin serta meningkatkan usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
2. Meningkatkan sistem dan strategi dalam menumbuhkembangkan wirausaha baru yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengembangan dan peningkatan peran UKM dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM yang handal.
4. Pengembangan dan perkuatan pembangunan industri kecil dan kerajinan rumah tangga dalam pengolahan hasil produksi pertanian dan peningkatan keanekaragaman yang mempunyai nilai komersial dan menguntungkan.
5. Revitalisasi dan pengembangan pasar tradisional, toko modern dan pasar penyangga dalam upaya menciptakan suasana kegiatan bisnis baru.
6. Mempertahankan penumbuhan aktifitas ekonomi yang kondusif serta peningkatan regulasi peluang investasi daerah.
7. Peningkatan daya saing produk melalui peranan Koperasi dan UMK dalam rangka pertumbuhan perekonomian daerah.
8. Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui program padat karya produktif;

9. Mengintegrasikan pengembangan usaha ekonomi sesuai dengan karakteristik daerah, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi serta potensi usaha bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di setiap kecamatan, desa/kelurahan.
10. Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat.
11. Membentuk perilaku petani yang berorientasi kemajuan dan keuntungan (*petani progressive*) dengan penggunaan teknologi dan komoditas yang lebih maju dalam merespon permintaan dan peluang pasar didukung perbaikan infrastruktur dan permodalan.
12. Penerapan sistem pertanian modern dan terpadu melalui teknologi tepat guna (TTG) dan peningkatan daya serap pasar terhadap produk unggulan.
13. Meningkatnya lapangan usaha di sektor jasa keparawisataan.
14. Peningkatan produktivitas lahan kritis dan lahan tidur (lahan marginal).
15. Pemanfaatan dan pengelolaan serta rehabilitasi pelestarian sumber daya hutan dan lingkungan.

Misi V : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik;

Sasaran misi kelima pada RPJMD Ke-2 ini adalah Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkelanjutan yang merupakan kebutuhan bersama yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Membangun struktur pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah

- dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas.
2. Mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif dan transparan dalam pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.
 3. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
 4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Daerah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi menuju pencapaian *good governance* dan *clean government* yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparatur.
 5. Menghormati supremasi hukum, melalui perilaku keteladanan aparatur pemerintahan dalam mematuhi dan menaati hukum.
 6. Perwujudan produk hukum daerah yg memihak kepentingan masyarakat.
 7. Menerapkan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang bersinergi dan terintegrasi yang didukung SDM yang handal.
 8. Terselenggaranya koordinasi perencanaan lingkup pemerintahan baik Pusat dan Daerah.
 9. Tersusunnya konsep perencanaan yang berkualitas dengan didasari oleh analisa study yang baik.
 10. Peningkatan Pengelolaan pendapatan dan aset daerah yang menekankan pada keserasian antara kebutuhan pengeluaran dan pendapatan.
 11. Pengembangan sistem informasi terpadu (*e-government*) yang dapat memperlancar dan meningkatkan mutu layanan.
 12. Setiap pimpinan harus mempunyai visi yang strategis dalam mencapai *good governance* dan *clean governance* dengan mengembangkan

kualitas SDM di semua bidang melalui penetapan indikator kinerja daerah.

13. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

14. Penerapan kualitas pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah secara akomodatif, kompetitif dan transparan.

5.2.3 RPJMD Tahap III (2015-2019)

Tahap Ketiga atau RPJMD Ke-3 dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini merupakan tahapan pencapaian sebagai kelanjutan pelaksanaan Periode Kedua, yang diarahkan pada pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian. Dan keunggulan daerah. Tahap Ketiga ini ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan yang lebih baik. Pada tahapan ini, focus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota jasa terkemuka.

Tahapan dan prioritas pembangunan pada Periode Ketiga ini adalah sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing;

Sasaran pencapaian pembangunan Misi I pada RPJMD Ke-3 ini adalah meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada

tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi kedua pada Periode Ketiga ini, maka ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada :

1. Mewujudkan sistem manajemen pendidikan yang demokratis dan semua stakeholder memberikan kontribusi di dalam memajukan dan menumbuhkembangkan suasana kondusif pada lembaga pendidikan.
2. Terciptanya suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya dalam berinovasi, berkreasi dan berkompetisi.
3. Pengembangan kualitas sekolah menengah kejuruan (SMK) berbasis life skill.
4. Keberlanjutan pengembangan perguruan tinggi melalui upaya kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
5. Mewujudkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
6. Mewujudkan akses layanan, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan didukung dengan penyediaan, pemerataan dan kualitas sarana pendidikan serta tenaga pendidik yang memiliki kompetensi.
7. Mewujudkan media pembelajaran yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi yang di dukung oleh tenaga pendidik yang professional.

8. Meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan dan masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
9. Pelaksanaan proses belajar yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai proses pembelajaran yang efektif dan kreatif.
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta kapasitas tenaga kesehatan secara profesional dan proporsional.
11. Keberlanjutan peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan balita.
12. Keberlanjutan akses pelayanan terhadap penanganan penyakit menular.
13. Keberlanjutan pengembangan jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu..
14. Menciptakan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat bagi masyarakat.
15. Peningkatan pengawasan obat dan makanan dan minuman..
16. Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pengendalian kehamilan serta peningkatan cakupan peserta KB.
17. Pengembangan, pengelolaan kekayaan budaya daerah.'
18. Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
19. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pembinaan dan pelatihan.
20. Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

21. Peningkatan kapasitas budaya dan tradisi lokal sebagai salah satu muatan pendidikan di sekolah.
22. Peningkatan optimalisasi peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan daerah.
23. Meningkatkan prestasi olah raga dan kesadaran masyarakat dalam berolahraga.
24. Meningkatkan peran dan partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan lainnya dalam pembangunan.
25. Menciptakan iklim yang kondusif, kreatif dan inovasi yang berbasiskan kebudayaan serta dan kerjasama sinergis antar etnis.

Misi II : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai ;

Sasaran misi Kedua pada RPJMD Ke- 3 ini adalah meningkatkan kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Balikpapan dengan aman dan nyaman serta berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan strategi dan kebijakan RPJMD Ke-3 ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Integrasi sarana dan prasarana antara Kota Balikpapan dengan wilayah sekitarnya sehingga peningkatan perekonomian dan pemenuhan komoditas di Kota Balikpapan dan sekitarnya dapat tercipta dengan sinergis.
2. Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta prasarana transportasi darat, laut dan udara yang handal serta berkelanjutan.
3. Peningkatan dan perluasan jaringan *mass trasport* (sarana transportasi

- massal) yang lebih modern dan ramah lingkungan seperti Saum, Trem, monorel, *mass rapid trasport* (jaringan kereta bawah tanah).
4. Bertambahnya sarana lahan parkir yang terus meningkat dengan implementasi kantong-kantong parkir yang terintegrasi dengan moda pendukungnya yang tersebar di seluruh kawasan strategis di Kota Balikpapan, untuk menghindarkan *parking on the street*.
 5. Berkurangnya titik genangan air melalui peningkatan sistim sarana prasarana drainase yang handal dalam rangka mengurangi titik-titik genangan maupun banjir yang terjadi di seluruh wilayah Kota Balikpapan, dengan intergrasi dan manajemen banjir melalui pengelolaan jaringan Bendali dalam masterplan drainsae dengan jaringan pendukungnya secara komprehensif.
 6. Peningkatan Prasarana dasar di Kawasan RSS yang meliputi sistem jaringan drainase, sanitasi sehat, dan jaringan jalan yang handal dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat menciptakan rasa nyaman dan berorientasi pada lingkungan.
 7. Peningkatan penyediaan hunian yang berbasis hunian vertikal untuk pemenuhan kebutuhan perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) untuk menghindarkan permukiman liar di daerah-daerah rawan bencana di Kota Balikpapan melalui Program-program rusunawa dan rusunami yang ramah lingkungan dengan aplikasi *green buliding* yang dilaksanakan pemerintah Kota Balikpapan secara berkelanjutan.
 8. Peningkatan standar mutu air baku dan pengembangan sumber air baku dengan pemantauan dan identifikasi penggunaan sumber air bawah tanah oleh masyarakat sehingga kehandalan sumber air bawah tanah

sebagai sumber air baku pendukung selain air permukaan (waduk dan Bendali) tetap terjaga.

9. Perluasan dan peningkatan pengembangan wilayah cakupan distribusi air minum hingga ke seluruh wilayah Kota Balikpapan serta implementasi teknologi pengolahan air yang terdistribusi menjadi air bersih layak minum pada akhir periode RPJP.
10. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya energi secara efektif dan efisien melalui pengasaan dan penindakan terkait penambangan galian c secara liar.
11. Peningkatan pemanfaatan dan implementasi sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan melalui diversifikasi energi listrik dari motor bakar menjadi energi listrik yang bersumber pada tenaga surya, tenaga angin dan sumber lain yang yang terbarukan dan ramah lingkungan pada instansi pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi lain di Kota Balikpapan.
12. menurunnya pelanggaran pemanfaatan ruang oleh stake holder.

Misi III : Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan ;

Sasaran misi ketiga pada RPJMD Ke-3 ini adalah menetapkan tata kelola untuk mewujudkan Balikpapan menjadi Kota layak Huni yang berwawasan lingkungan melalui sasaran pokok yang telah ditetapkan yang berorientasi pada lingkungan dan implementasi kebijakan yang pro lingkungan agar tercipta kenyamanan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Sanitasi Sehat adalah bagian dari sasaran pokok yang dituangkan melalui strategi menurunkan jumlah sampah yang terbangun ke TPA, yang mencerminkan kesadaran masyarakat dalam program 3R (reduce, reuse, recycling) yang telah dicanangkan pemerintah Kota Balikpapan dan menjadi isu *global warming*, menurunnya titik genangan yang tersebar di kawasan Kota Balikpapan merupakan bagian dari pengembangan sanitasi sehat, dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas IPAL dan sebaran IPAL di Kota Balikpapan sebagai bentuk sanitasi sehat pada sektor air limbah.
2. Mempertahankan pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya merupakan sasaran pokok yang implematasinya adalah manajemen kontrol kawasan berjalan efektif dengan kontrol dari pemerintah Kota agar dapat mempertahankan Pola ruang pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya sampai pada masa RPJP berakhir.
3. Menurunkan degradasi dan perubahan pemanfaatan lahan non budidaya menjadi kawasan budidaya yang sedikit banyak akan mempengaruhi proporsi pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya.
4. Perluasan dan peningkatan kapasitas sistem ATCS dan ITC yang telah diimplementasikan untuk jaminan keamanan dan dan ketertiban dalam berlalulintas oleh masyarakat Kota Balikpapan.

Misi IV : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Sasaran pencapaian pembangunan Misi IV pada RPJMD Ke-3 ini adalah mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada

ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada perdagangan dan jasa, agribisnis, agroindustri, pariwisata, yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal serta cluster usaha tingkat kelurahan/pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada sektor basis daerah akan menjadi pondasi perekonomian daerah, makin besarnya peranan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam perekonomian daerah, makin tumbuhnya kawasan ekonomi pedesaan berbasis cluster usaha, disertai dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi keempat pada Periode Ketiga ini, maka ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada :

1. Mengintegrasikan ekonomi produktif serta pusat-pusat pertumbuhan baru dalam sistem jaringan infrastruktur dan komunikasi untuk mempermudah transportasi pemasaran hasil produksi, terbentuknya kawasan agribisnis dan agroindustri dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
2. Peningkatan peluang bagi industri kecil, kerajinan rakyat, koperasi dan UKM yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkuatan keterkaitan industri yang selaras dengan pusat-pusat pertumbuhan baru dengan memperhatikan pelestarian lingkungan bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Mempertahankan dan mengembangkan peluang investasi dan perkuatan jaringan pemasaran skala regional dan nasional.

4. Revitalisasi dan pengembangan pasar tradisional, pasar modern dan pasar penyangga dalam rangka menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar dan pendukung lainnya serta memperkuat regulasi investasi daerah.
6. Peningkatan daya saing produk dan peranan Koperasi, UMKM dan industri kecil dalam perekonomian daerah melalui peningkatan SDM dan teknologi dalam rangka peningkatan nilai produk pertanian.
7. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan dan jasa, pengembangan kemitraan, promosi, dan lapangan usaha sektor jasa kepariwisataan.
8. Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui program padat karya produktif dan penerapan sistem pertanian modern dan terpadu melalui teknologi tepat guna (TTG) serta peningkatan daya serap pasar terhadap produk unggulan.
9. Mengintegrasikan pengembangan usaha sesuai dengan karakteristik daerah dan pengusah serta potensi usaha di setiap kecamatan, desa/kelurahan.
10. Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat.
11. Pengembangan kawasan bididaya perikanan melalui pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya sungai, air payau dan air tawar.
12. Peningkatan pemamfaatan potensi lahan disekitar hutan yang berwawasan lingkungan.
13. Peningkatan produktivitas lahan kritis dan lahan tidur (lahan marginal)

14. Terjaminnya pemanfaatan dan pengelolaan rehabilitasi dan pelestarian sumber daya hutan dan lingkungan yang berkesinambungan dan keberlanjutan.

Misi V : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik

Sasaran pencapaian pembangunan Misi I pada RPJMD Ke-3 ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tenteram, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, meningkatnya kualitas aparatur daerah, makin baiknya kelembagaan pemerintah dalam pemberian pelayanan, dan makin berkembangnya kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai komponen. Pada kondisi ini diharapkan semakin mantap regulasi dan kebijakan otonomi daerah dalam berbagai aspek, kondusifnya iklim politik, keamanan, ketertiban, dan hukum daerah, perkuatan sistem kelembagaan pemerintah dalam pemberian pelayanan, serta makin meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi kesatu pada Periode Ketiga ini, maka ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada :

1. Mewujudkan terselenggaranya menegakkan *rule of law* (kekuasaan hukum) secara adil dan demokratis, mentransformasikan berbagai nilai

- kebijakan daerah yang merupakan kekuatan kelembangaan sosial dan adat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai sengketa dalam masyarakat.
2. Mewujudkan kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan serta penerapan teknologi menuju pencapaian good governance dan clean government.
 3. Meningkatkan kualitas peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dalam pembangunan daerah.
 4. Menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik serta penerapan teknologi informasi dalam sistem birokrasi.
 5. Perwujudan kualitas produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat.
 6. Menerapkan sinergitas sistem perencanaan dengan pengelolaan keuangan daerah yang lebih terarah, efektif, efisien dan akuntabel.
 7. Terselenggaranya koordinasi perencanaan lingkup pemerintahan baik Pusat dan Daerah secara akomodatif dan terintegrasi.
 8. Pelaksanaan konsep perencanaan yang berkualitas dengan didasari oleh analisa studi dan kajian/penelitian yang berdaya guna, dalam meningkatkan penerapan kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan.
 9. Peningkatan Pengelolaan pendapatan dan aset daerah yang menekankan pada keserasian antara kebutuhan pengeluaran dan pendapatan.
 10. Peningkatan sistem informasi terpadu (e-government) dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu layanan.
 11. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat.

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah secara akomodatif, kompetitif dan transparan.
13. Memantapkan penerapan standar pelayanan minimum secara konsisten dan berkelanjutan dalam menciptakan kualitas pelayanan.
14. Berkembangnya dan semakin mantapnya kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai komponen masyarakat dengan regulasi dan kebijakan otonomi daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat, didukung iklim politik yang kondusif, keamanan, ketertiban, serta adanya kepastian hukum/peraturan daerah.

5.2.4 RPJMD Tahap IV (2020-2024)

RPJMD ke-4 ini diorientasikan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Kota Balikpapan dalam mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya yang berwawasan Lingkungan, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera.

Tahapan dan prioritas pembangunan pada Periode Keempat ini adalah sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing ;

Untuk mencapai Visi Kota Balikpapan di atas, maka sasaran Misi Kedua pada tahap terakhir RPJPD ini adalah memantapkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadinya kondisi kesejahteraan masyarakat sudah dapat diwujudkan baik lahir maupun batin, makin mantapnya harmonisasi hubungan perikehidupan bermasyarakat berasaskan norma dan nilai hukum, budaya dan agama, mantapnya karakter sumber daya manusia yang unggul, tangguh, kompetitif, bermoral, berbudaya, beretos kerja tinggi dan berkembang secara dinamis. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi kedua ini pada tahap terakhir RPJPD ini, ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada :

1. Mewujudkan masyarakat terdidik yang berkarakter, inovatif, kreatif, berbudaya, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama, beretos kerjaserta professional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas berstandar nasional dan berdaya saing semua jenjang pendidikan yang terstruktur dan berkesinambungan dengan didukung sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional.
2. Mewujudkan Kota Pendidikan, dengan prioritas pada pencapaian sistem pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran, pemerataan akses tenaga pendidik dan penerapan pelayanan pendidikan yang

berkualitas sehingga pendidik dan tenaga kependidikan mampu bersaing dalam regional maupun nasional.

3. Memantapkan kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui dukungan teknologi informasi.
4. Menciptakan gerakan peduli pendidikan, melalui kawasan lingkungan sosial yang nyaman dan aman dengan prinsip pendidikan adalah “ibadah dan pendidikan untuk semua”
5. Membentuk masyarakat yang mempunyai wawasan dan perilaku hidup sehat.
6. Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
7. Tersedianya sarana dan prasarana serta sarana pendukung dan layanan kesehatan representative.
8. Mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya dan memberi perlindungan akan kelestarian aset budaya.
- 9.

Misi II : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai ;

Sasaran misi Kedua pada RPJMD Ke- 4 ini adalah Pemantapan pencapaian kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Balikpapan dengan aman dan nyaman serta berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan strategi dan kebijakan RPJMD Ke-4 ini adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan Integrasi sarana dan prasarana antara Kota Balikpapan dengan wilayah sekitarnya sehingga peningkatan perekonomian dan

- pemenuhan komoditas di Kota Balikpapan dan sekitarnya dapat tercipta dengan sinergis.
2. Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta prasarana transportasi darat, laut dan udara yang handal serta berkelanjutan.
 3. Pemantapan dan perluasan jaringan *mass trasport* (sarana transportasi massal) yang lebih modern dan ramah lingkungan seperti Saum, Trem, monorel, *mass rapid trasport* (jaringan kereta bawah tanah).
 4. Bertambahnya sarana lahan parkir yang terus meningkat dengan implementasi kantong-kantong parkir yang terintegrasi dengan moda pendukungnya yang tersebar di seluruh kawasan strategis di Kota Balikpapan, untuk menghindarkan *parking on the street*.
 5. Berkurangnya titik genangan air melalui peningkatan sistim sarana prasarana drainase yang handal dalam rangka mengurangi titik-titik genangan maupun banjir yang terjadi di seluruh wilayah Kota Balikpapan, dengan intergrasi dan manajemen banjir melalui pengelolaan jaringan Bendali dalam masterplan drainsae dengan jaringan pendukungnya secara komprehensif.
 6. Peningkatan Prasarana dasar di Kawasan RSS yang meliputi sistem jaringan drainase, sanitasi sehat, dan jaringan jalan yang handal dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat menciptakan rasa nyaman dan berorientasi pada lingkungan.
 7. Peningkatan penyediaan hunian yang berbasis hunian vertikal untuk pemenuhan kebutuhan perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) untuk menghindarkan permukiman liar di daerah-daerah rawan

bencana di Kota Balikpapan melalui Program-program rusunawa dan rusunami yang ramah lingkungan dengan aplikasi *green buliding* yang dilaksanakan pemerintah Kota Balikpapan secara berkelanjutan.

8. Pencapaian standar mutu air baku sesuai dengan target dan pencapaian volume kapasitas sumber air baku melalui pemanfaatan sumber air bawah tanah sebagai sumber air baku pendukung selain air permukaan (waduk dan Bendali)
9. Pencapaian target dan wilayah cakupan distribusi air minum hingga ke seluruh wilayah Kota Balikpapan serta implementasi teknologi pengolahan air yang terdistribusi menjadi air bersih layak minum pada akhir periode RPJP.
10. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya energi secara efektif dan efisien melalui pengasaan dan penindakan terkait penambangan galian c secara liar.
11. Peningkatan pemanfaatan dan implementasi sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan melalui diversifikasi energi listrik dari motor bakar menjadi energi listrik yang bersumber pada tenaga surya, tenaga angin dan sumber lain yang ramah lingkungan pada instansi pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi lain di Kota Balikpapan.
12. Menurunnya pelanggaran pemanfaatan ruang oleh stake holder.

Misi III : Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan;

Sasaran misi ketiga pada RPJMD Ke-4 ini adalah memanfaatkan tata kelola untuk mewujudkan Balikpapan menjadi Kota layak Huni yang berwawasan

lingkungan melalui sasaran pokok yang telah ditetapkan yang berorientasi pada lingkungan dan implementasi kebijakan yang pro lingkungan agar tercipta kenyamanan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Tercapainya tujuan Sanitasi Sehat adalah bagian dari sasaran pokok yang dituangkan melalui strategi menurunkan jumlah sampah yang terbangun ke TPA, yang mencerminkan kesadaran masyarakat dalam program 3R (reduce, reuse, recycling) yang telah dicanangkan pemerintah Kota Balikpapan dan menjadi isu *global warming*, menurunnya titik genangan yang tersebar di kawasan Kota Balikpapan merupakan bagian dari pengembangan sanitasi sehat, dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas IPAL dan sebaran IPAL di Kota Balikpapan sebagai bentuk sanitasi sehat pada sektor air limbah.
2. Mempertahankan pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya merupakan sasaran pokok yang implementasinya adalah manajemen kontrol kawasan berjalan efektif dengan kontrol dari pemerintah Kota agar dapat mempertahankan Pola ruang pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya sampai pada masa RPJP berakhir.
3. Menurunkan degradasi dan perubahan pemanfaatan lahan non budidaya menjadi kawasan budidaya yang sedikit banyak akan mempengaruhi proporsi pola ruang 52% Kawasan lindung dan 48% Kawasan Budidaya,
4. perluasan dan peningkatan kapasitas sistem ATCS dan ITC yang telah diimplementasikan untuk jaminan keamanan dan ketertiban dalam berlalulintas oleh masyarakat Kota Balikpapan.

Misi IV : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Sasaran pencapaian Misi Keempat pada Periode IV ini adalah mempertahankan dan memantapkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada perdagangan dan jasa, agribisnis, agroindustri, pariwisata, yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal, serta cluster usaha tingkat kelurahan/pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan pada kondisi ini diharapkan sudah dapat dicapai dan berkembang seperti terjadinya kondisi perekonomian daerah yang mantap, tumbuh dengan signifikan berbasis struktur yang kuat, mantapnya kekuatan pelaku ekonomi kerakyatan yang sinergis dengan pelaku ekonomi kuat, serta meratanya pembangunan antar kawasan yang berbasis cluster usaha produktif. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi keempat pada tahap akhir RPJPD ini, ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada :

1. Membentuk dan memperkuat lembaga/usaha koperasi, ekonomi produktif, kreatif dan industri kecil serta kerajinan kreatif yang menghasilkan produk yang berkualitas, orisinal, dan berpeluang memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan.
2. Membentuk perilaku petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan pengembangan potensi sumber daya lokal daerah dan memantapkan kelembagaan yang berorientasi kemajuan, keuntungan dan modern.
3. Membentuk sistem jaringan informasi perdagangan, kemitraan, promosi, pemasaran pariwisata dan peningkatan investasi daerah.

4. Pemantapan sistem pendukung usaha bagi UMKM.
5. Terwujudnya penataan perdagangan dan jasa, sub-sistem agribisnis, agroindustri, ekowisata, dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengolahan dan pemasaran produk pertanian serta pelayanan wisata secara optimal, efisien, mempunyai nilai tambah dan berdaya saing.
6. Mewadahi aspirasi dan peran perempuan dalam kegiatan sosial dan ekonomi dan terbentuknya kelompok kegiatan sosial dan ekonomi yang produktif dalam rangka meningkatkan dan pengembangan diri menuju kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan kawasan konservasi dan pemanfaatan potensi sumber daya lahan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Misi V : Mewujudkan Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik

Sasaran misi kelima pada tahap terakhir RPJPD ini adalah mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat birokrasi, penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada kondisi ini pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip good governance and clean government sudah mantap dan sudah dapat dicapai sehingga KKN menjadi sangat minimal, kemudian kemampuan dan

kapasitas daerah juga semakin mantap sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan efektif dan efisien, selanjutnya kondisi kerjasama dan networking juga semakin berkembang dan berdampak positif bagi kemajuan daerah. Kesemuanya berdampak kepuasan bagi masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Pada kondisi ini diharapkan terjadi pula kondisi demokrasi yang mantap didukung dengan konsistensi kebijakan reformasi pembangunan, makin matang dan mantapnya kepemimpinan kepala daerah, makin mantapnya supremasi hukum, dan berkurangnya kriminalitas, serta semakin mantapnya sistem kelembagaan pemerintahan dalam pemberian pelayanan pada daerah otonomi baru. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pertama ini pada tahap terakhir RPJPD ini, ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata Pemerintahan yang baik (*good governance and clean government*) berorientasi pada masyarakat (*people center oriented*), selaras budaya setempat (*culturally appropriate*), berwawasan lingkungan (*environmentally sound*) dan tidak diskriminatif (*non discriminative*). Arah pembangunan yang perlu diwujudkan pada tahap ini adalah melakukan pembaharuan komitmen terhadap penegakan hukum yang berkeadilan atau tidak diskriminatif, pembenahan terhadap berbagai peraturan daerah guna menyesuaikan dengan perubahan hukum nasional, pementapan pelaksanaan desentralisasi, demokratisasi, penegakan supremasi hukum dan HAM serta mengatur peran serta masyarakat

dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan daerah sebagai salah satu upaya pencapaian tata pemerintahan yang baik, kredibel, transparan, dan akuntabel.

2. Terwujudnya kemampuan dan kapasitas daerah, jaringan kerjasama (networking) serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik yang efektif sehingga meningkatnya kepuasan pelayanan masyarakat yang diberikan pemerintah.
3. Menciptakan kondisi pemerintahan yang kondusif, aman, tertib dan tentram yang ditandai dengan berkurangnya angka kriminalitas serta membangun kapasitas kelembagaan sosial dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah menurut hukum atau secara musyawarah mufakat.
4. Mewujudkan konsistensi kebijakan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.